

BAB I

PENDAHULUAN

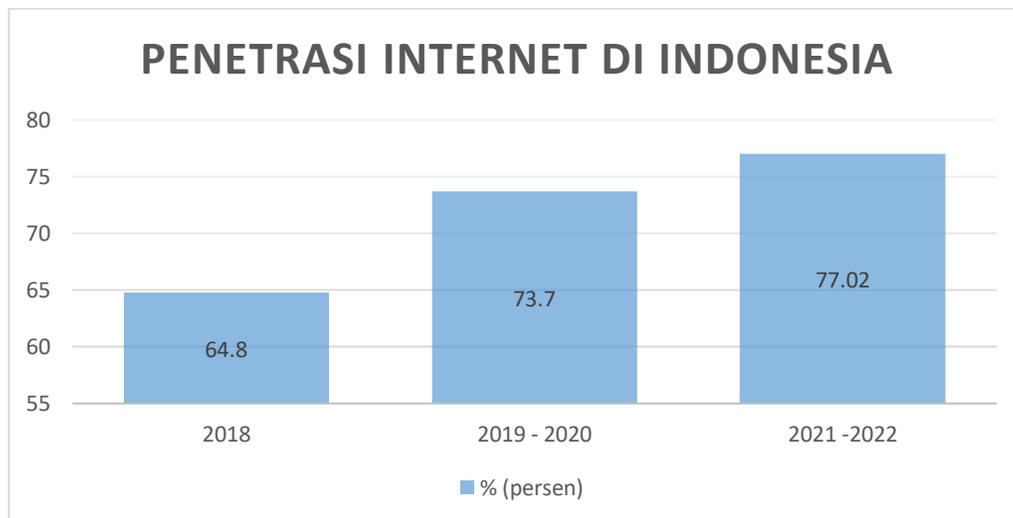
1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan dunia yang semakin pesat, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat khususnya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga mampu menggalakkan untuk memajukan intensitas penggunaan teknologi dalam kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya sangat terbatas dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi dalam kebutuhan sehari-hari, namun kini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kebutuhan hidup (Kristiyono, 2015).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dalam pemenuhan kebutuhan hidup dapat diperoleh melalui media yang lebih canggih maupun modern yaitu dengan memanfaatkannya perkembangan teknologi. Teknologi hadir tidak hanya untuk mempermudah serta menyelesaikan berbagai masalah bagi manusia itu sendiri, melainkan perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan mulai dari komunikasi, penyebaran informasi, menciptakan kreativitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan, dan juga tidak terkecuali pada aspek tata pengelolaan pemerintah (Kristiyono, 2015).

Salah satu bagian dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang menawarkan sisi kemudahan, kecanggihan, dan kepraktisan ialah *Interconnected Network* atau biasa disebut dengan internet. Internet adalah sebuah jaringan telekomunikasi yang mempermudah dalam memperoleh informasi tanpa batas yang membuat komunikasi berjalan dengan lancar kapanpun dan dimanapun berada. Mulai dari instansi pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan masyarakat Indonesia mengandalkan teknologi untuk memanfaatkan berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi di seluruh dunia (Hakim, 2019). Berikut penjelasan mengenai grafik penetrasi internet di Indonesia sampai tahun 2022 (Gambar 1.1) dan tingkat penetrasi internet di Indonesia berdasarkan wilayah tahun 2022 (Gambar 1.2).

Gambar 1. 1 Penetrasi Internet di Indonesia

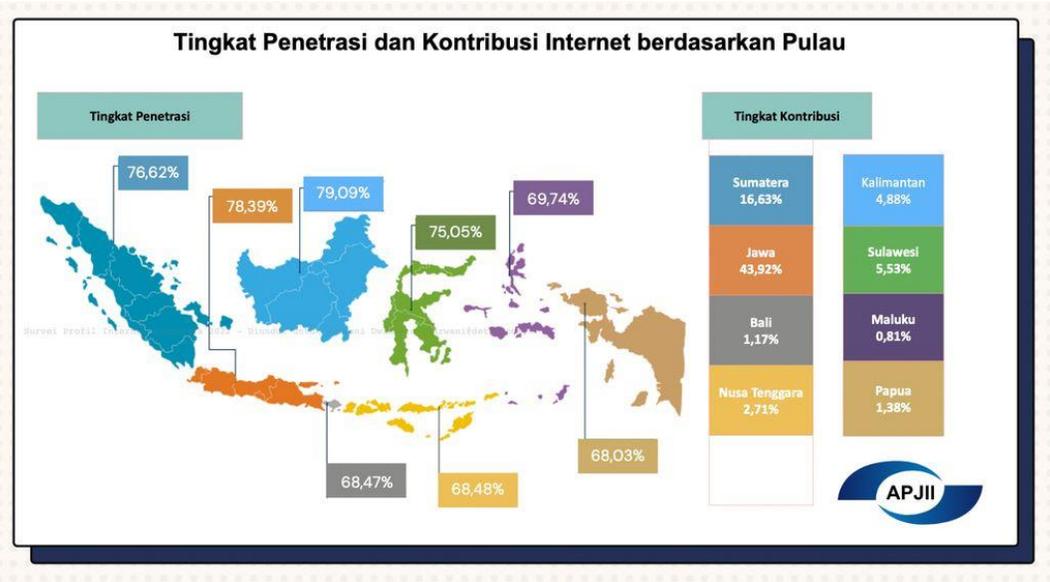


Sumber: Databoks Katadata 2022

Penetrasi internet merupakan presentase terhadap orang yang menggunakan internet di suatu negara. Berdasarkan dari hasil *survey* yang telah dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pemakai internet di Indonesia terus melonjak setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penetrasi berada di angka 64,80% yang kemudian terus naik di tahun 2019-2020 dengan penetrasi sebesar 73,70%. Pada tahun 2021-2022 lonjakan penetrasi internet di Indonesia semakin naik menjadi sebesar 77,02% dengan jumlah 210,03 juta orang pengguna internet dari jumlah total populasi penduduk 272 juta jiwa (Pahlevi, 2022). Jumlah itu meningkat 3,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sejumlah 196,7 juta orang (Bayu, 2022).

Gambar 1. 2

Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia Berdasarkan Wilayah Tahun 2022



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022

Berdasarkan dari wilayah tingkat penetrasi internet terpusat di Pulau Kalimantan sebagai peringkat tertinggi yaitu dengan persentase 79,09%. Selanjutnya pada posisi peringkat kedua yaitu oleh Pulau Jawa dengan presentase 78,39%. Kemudian pada peringkat ketiga dengan presentase 76,62% penggunaan internet berasal dari Pulau Sumatera. Selanjutnya pada posisi keempat yaitu 75,05% berasal dari Pulau Sulawesi. Presentase selanjutnya pada posisi kelima yaitu 69,74% berasal dari Pulau Maluku, posisi keenam yaitu 68,48% berasal dari Pulau Nusa Tenggara, posisi ketujuh yaitu 68,47% dari Pulau Bali, dan pada posisi terakhir yaitu 68,03% dari Pulau Papua (Khairuddin, 2022).

Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini telah merubah nilai dari pembaharuan yang ada terhadap konsep perkembangan tata kelola pemerintahan. Melalui perubahan-perubahan dunia dengan perkembangan teknologi, pemerintah dalam memberikan pelayanan harus dapat beradaptasi agar tetap dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat dinamis terhadap perkembangan teknologi (Putra, 2018).

Pemerintah harus memulai secepatnya memanfaatkan TIK dalam menyelesaikan beragam masalah yang ada di perkotaan dan memanfaatkannya pula dalam penyebaran informasi, inovasi, pemberian pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan (Zokaee dkk., 2017). Seperti melalui penggunaan *website* yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi dalam mewujudkan transparansi, sebagai bentuk komunikasi dan sosialisasi segala bentuk kebijakan yang berlaku, serta

sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun brand image sebagai penyedia layanan publik agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah dan dapat berdampak pada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Telah diketahui bersama bahwa perkembangan teknologi tidak terlepas dari konsep *smart city*. *Smart city* merupakan isu global yang telah banyak di implementasi diseluruh kota-kota dunia, baik kota di Negara maju maupun kota di Negara berkembang seperti Indonesia. (Kurniasari dkk., 2020)

Program pemerintah yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah program Kota Cerdas atau *Smart City*. Program *smart city* di populerkan di Indonesia bermula dari diluncurkannya Gerakan 100 *Smart City* dalam upaya pengembangan program digitalisasi perkotaan, terdapat tiga cakupan rencana, yang pertama *smart connectivity* (infrastruktur), kedua *smart solution* (lingkungan, tata kelola, warga, keamanan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan), dan ketiga *smart users* (komunitas) (Herdiyanti dkk., 2019). Melalui penerapan *smart city*, pembangunan perkotaan diberikan jaminan dalam membuat pengelolaan kota secara cerdas melalui pemanfaatan TIK. Implementasi *smart city* di Indonesia memiliki tantangan dan limitnya tersendiri mulai dari infrastruktur yang belum memadai, kesiapan pemerintah, serta masyarakat yang belum sepenuhnya dapat beradaptasi dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sebuah upaya yang dapat dilakukan ialah melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak kepentingan.

Selain itu, *smart city* juga dipahami sebagai sebuah program yang mampu memberi kemudahan kepada kalangan masyarakat dalam mengelola sumber daya sekitar dengan lebih efektif maupun efisien dan memudahkan mendapatkan informasi dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Seperti hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2018) menerangkan bahwa terdapat beberapa kota yang telah berhasil menerapkan konsep *smart city* yang mana bisa lebih mengurangi beragam permasalahan yang ada di kota tersebut.

Kota pintar atau *smart city* telah dikenal dikalangan masyarakat luas, masyarakat memandang bahwa program *smart city* hanyalah sebuah program yang menghamburkan anggaran dengan menciptakan aplikasi maupun sistem yang dapat di gunakan oleh masyarakat. Melainkan penerapan *smart city* jauh lebih dari itu, di kota-kota besar dalam mewujudkan *smart city* membutuhkan banyak dukungan dan hubungan dari pemerintah daerah dengan masyarakat (Fitri, 2017).

Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam pelayanan. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah yaitu wajibnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimana mengedepankan dalam memberikan pelayanan yang puas bagi masyarakat. Dalam mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan *smart city* di suatu kota, terdapat empat tujuan, yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup warga. Pengoptimalan pelayanan publik akan berdampak langsung kepada kualitas hidup warga.

2. Mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan kepada publik agar pelayanan lebih efektif dan efisien, melalui pengurangan biaya transaksi dalam pengiriman pelayanan publik.
3. Untuk mempromosikan tata kelola inklusif. Dalam pembangunan *smart city* juga ditumbuhkan semangat kolaboratif bagi setiap *stakeholder*. Dalam kolaborasi dapat menciptakan peluang bagi lembaga pemerintah yang berbeda untuk mengintegrasikan pelayanan publik.
4. Inklusi populasi rentan dan kurang beruntung. Pengembangan *smart city* juga diharapkan dapat mengangkat masyarakat yang kurang mampu melalui peningkatan kemampuan mereka.

Program *smart city* telah diterapkan di beberapa kota penjurur Dunia, baik yang berada di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri. *Smart city* sebagai program yang mengandalkan teknologi informasi, hingga memberikan kemudahan bagi masyarakat, seolah mampu sebagai penyelesaian berbagai permasalahan yang rumit di perkotaan (Insani, 2017). Beberapa pemerintahan Kota Luar Negeri yang telah menerapkan program *smart city* diantaranya yaitu Pemerintah Kota New York, Kota Seoul, Kota Kanada, dan Kota Singapura. Sedangkan pada Kota Dalam Negeri yaitu ada Pemerintah Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kota Yogyakarta (Fitri, 2017)

Penerapan *smart city* diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk. Pemerintah Kota Kanada menciptakan sebuah system bernama *Smart Waterfront Development*, yang mana berkolaborasi dengan perusahaan Sidewalk Labs. Pemerintah kota Seoul memasang lebih dari 45.000 sensor pintar IoT yang sudah tertanam di penjuru kota Seoul untuk mengidentifikasi data kehidupan perkotaan termasuk tingkat polusi udara, lalu lintas, tingkat kebisingan, sinar UV, getaran, dan sebagainya. (Mursalim, 2017)

Pemerintah Kota Singapura meluncurkan sistem transportasi yang bernama “*One Monitoring*” yaitu sebuah portal global di mana masyarakat dapat mengakses informasi lalu lintas yang dikumpulkan melalui kamera pengintai yang di taruh di setiap taksi dan jalan dengan menggunakan GPS. Pemerintahan Kota New York menerapkan sistem *Automated Meter Reading* dengan skala besar sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas air yang dikonsumsi warganya (Haryono, 2012).

Selanjutnya pada penerapan *smart city* di Dalam Negeri yaitu Pemerintah Kota Bandung menghadirkan beragam system dan aplikasi diantaranya, SIP (untuk rapor camat oleh warga), Hay U (untuk perizinan *online*), dan *citizen complaint online*. Pemerintah Kota Yogyakarta membuat aplikasi yang bernama “*Jogja Smart City*” yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi pelayanan publik melalui *online*. Pemerintah Kota Denpasar mendesain sistem yang bernama “*Damamaya Denpasar Cyber Monitoring*”. Layanan tersebut sebagai pusat control seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota

Denpasar. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan *Smart Environment*, sebagai *Integrated Traffic System Management* yaitu sebuah sistem yang memiliki tujuan dalam mengelola permasalahan manajemen lalu lintas secara strategis (Widodo & Permatasari, 2020).

Kota Bekasi juga telah merancang program kota cerdas yang bernama Bekasi *Smart City*. Sebagai gerakan dalam mendukung visi Bekasi cerdas program Bekasi *Smart City* lahir dan dirintis langsung oleh Walikota Bekasi. *Smart city* dirancang sebagai program yang meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kualitas taraf hidup warga Kota Bekasi, serta mendukung visi yang telah ditetapkan, yakni menjadi kota humanis, beradab, teratur, maju serta berwawasan lingkungan (Putra, 2018)

Dalam menyongsong program *smart city*, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan sebuah Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi. Serta Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555.8/KEP.231 DISKOMINFOSTANDI/V/2021 Tentang Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi, dimana dalam kebijakan tersebut berisi tahapan-tahapan yang diperlukan sesuai dengan fungsi, tugas, serta kewenangan masing-masing pihak dalam melaksanakan pengembangan Bekasi *Smart City*. Selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah NOMOR 02 TAHUN 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi

Pada tahun 2018 Kota Bekasi menduduki peringkat ketiga yang menerima penghargaan dalam kategori kota tersiap dalam pengimplementasian *Smart City* di ajang Indonesia *Smart Nation Award* (ISNA). Hingga saat ini implementasi program *Smart City* di Kota Bekasi masih terus dilakukan, diantaranya dengan mewujudkan berbagai aplikasi seperti Aplikasi Sikerja, Aplikasi SILAT, Aplikasi Absensi, Aplikasi Sorot, Aplikasi Pengaduan *Online* Terpadu, Aplikasi Bekasi *Iconic*, dan Aplikasi Rapot RT RW dan SIAP yang terintegrasi dengan *Command Center* (Widodo & Permatasari, 2020).

Definisi *smart city* sangatlah beragam dengan kondisi yang berbeda dalam cara penerapannya. *Smart city* memiliki enam indikator, yaitu terdiri dari *smart living*, *smart economy*, *smart people*, *smart environment*, *smart mobility*, dan terakhir *smart governance* yang mempunyai fokus tersendiri di dalam pembangunan kota yang cerdas (Irfan dkk., 2018). Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dapat memfasilitasi para petinggi pemerintahan untuk berinteraksi kepada masyarakat sekitar secara langsung, dan upaya pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi ialah sebagai akses mempermudah dalam memantau infrastruktur yang sedang dilakukan disuatu kota tersebut, serta melihat bagaimana kemajuan kota itu berkembang, dan mencari cara penyelesaian dari permasalahan kota yang sedang dihadapi secara bijak tanpa membuat rugi berbagai pihak (Setiawan, 2017).

Dalam mengimplementasikan program Bekasi *Smart City*, pemerintah Kota Bekasi tidak bisa bertindak sendiri. Agar program *smart city* bisa berjalan tentunya

Pemerintah Kota Bekasi harus berkolaborasi terhadap berbagai pihak kepentingan. Kolaborasi adalah bentuk interaksi, kerjasama, kompromi dari beberapa elemen penting yang saling berhubungan dengan melibatkan individu, lembaga dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung (Kurniasari dkk., 2020).

Menurut Morales dan Meek (2019) tahapan dalam suatu kolaborasi yang dilakukan dengan pihak terkait merupakan wujud pelaksanaan suatu tujuan untuk tercapainya program *smart city* terdapat tata kelola yang mengatur kolaborasi tersebut dalam pekerjaan sehari-hari termasuk dalam kolaborasi dengan semua *multistakeholder* yang menekankan pada suatu program seperti, pengumpulan data, penetapan kebijakan serta pelaksanaan semua pihak yang terkait dengan membentuk jaringan pemerintahan. Jaringan pemerintah tersebut terdiri dari pemerintah kota yang bertanggung jawab langsung yang berkaitan dengan politik lingkungan dan jaringan secara keseluruhan (Morales & Meek, 2019).

Sementara teori yang digunakan untuk melihat bagaimanakah pengimplementasian kerja sama yang dilakukan antara *multistakeholders* pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen penting dari sebuah kota seperti keterlibatan sector usaha, partisipasi masyarakat, serta badan publik lainnya ialah dengan teori *collaborative governance* dalam menjalankan tatakelola pemerintahan dalam mewujudkan kota yang cerdas. Seperti yang telah dilakukan oleh Kota Vancouver, Canada sebagai pelopor strategi kolaboratif yang dalam pengimplementasian *smart city* melibatkan 30.000 warganya dalam membentuk *Action Plan Vancouver Greenest City*

pada tahun 2020. Pemerintah Kota Medellin di Kolombia, berfokus pada reaktualisasi perkotaan dari bawah ke atas melalui melibatkan masyarakat (publik) dari suatu lingkungan perkotaan yang mana berpengaruh secara langsung dalam berbagai proyek transformatif, misalnya pembangunan kereta gantung, tangga listrik, sekolah dan perpustakaan yang didukung oleh digital teknologi. Dan juga dalam hal ini Medellin menjalin kerjasama dengan warganya dalam mengembangkan sebuah kota yang terus berinovasi dan mempertahankan bakat kewirausahaan warga (Syalianda & Kusumastuti, 2021)

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang banyak menjalin kerja sama, baik itu dengan sector usaha, lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, mengingat Kota Bekasi mempunyai banyak potensi yang belum tergali sehingga untuk memaksimalkan potensi tersebut seringkali melibatkan dengan pihak lain. Dalam hal ini Pemerintah kota Bekasi bekerjasama dengan salah satu sector usaha yaitu dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Pemerintah Kota Bekasi telah bekerjasama dengan PT. Telkom Sejak tahun 2017 hingga saat ini. PT. Telkom telah berkontribusi dalam mendukung mewujudkan Bekasi *Smart City*, yaitu dengan mengadakan 1000 titik *Wifi* yang terletak disetiap sudut ruang publik maupun lingkungan pemerintahan kota Bekasi, guna sebagai sarana dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan publik secara efektif dan efisien.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK). Pemerintah republik Indonesia merupakan pemegang saham terbesar perusahaan PT Telkom yaitu sebesar 52.09%, sedangkan sisanya 47.91% dikuasai oleh publik. Perusahaan Telkom Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung penuh pemerintah dalam upaya meningkatkan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan tujuan yaitu untuk memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi, sosial, hukum serta lingkungan dan tata Kelola bagi perusahaan; berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip terintegrasi, terarah, akuntabel dan terukur dampaknya; serta mendorong usaha mikro dan makro supaya lebih tangguh dan mandiri (Telkom, 2020).

PT Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara tentunya mendukung penuh upaya pemerintah, terutama dalam mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek. Dengan infrastruktur yang handal dilengkapi dengan berbagai produk dan layanan yang beragam, PT. Telkom hadir mengembangkan masyarakat digital, membangun lingkungan digital, dan percepatan ekonomi digital melalui tiga domain yaitu konektivitas, platform, dan layanan. Dukungan digitalisasi yang di berikan PT. Telkom salah satunya ialah berkontribusi dalam solusi *smart city* untuk kota dan kabupaten di Indonesia, yang merupakan salah satu *digital services* yang dikembangkan (Telkom, 2020).

Smart city adalah solusi yang ditawarkan oleh PT. Telkom untuk percepatan kota dan kabupaten menjadi kawasan yang pintar dan modern. Terdapat pilar utama

dalam pengembangan *Smart City* Telkom, antara lain *Smart Integrated City*, *Ecosystem Management*, *Smart Infrastructure*, dan *Smart Solution*. Dalam kolaborasi ini perusahaan PT Telkom menyumbangkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* guna membantu Kota Bekasi dalam merealisasikan terlaksananya Bekasi *Smart City*.

Dari uraian di atas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telkom dirasa akan memberikan banyak manfaat, kemajuan dan keuntungan bagi kedua belah pihak, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan PT. Telkom sebagai upaya untuk mewujudkan Bekasi Kota Cerdas, maka dari itu penulis mengambil judul: “***Collaborative Governance Pemerintah Kota Bekasi dan PT Telkom dalam Mewujudkan Bekasi Smart City***”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *collaborative governance* antara pemerintah Kota Bekasi dan PT Telkom dalam mewujudkan Bekasi *Smart City*?
2. Bagaimana penerapan pembangunan infrastruktur Bekasi *Smart City*?
3. Bagaimana Persepsi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur *Smart City* Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *collaborative governance* pemerintah Kota Bekasi dan PT. Telkom dalam mewujudkan Bekasi *Smart City*

2. Menganalisis penerapan pembangunan infrastruktur Bekasi *Smart City*
3. Menganalisis Persepsi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur *Smart City* Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik *collaborative governance* dalam mewujudkan *smart city*. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terkait Kolaboratif Pemerintah Kota Bekasi Dan PT Telkom Dalam Mewujudkan Bekasi *Smart City*.

Penelitian pertama disusun oleh Miftahul Jannah Jalil pada tahun 2020 dengan judul “*Collaborative Governance* Pemerintah Kota Palopo Dengan PT-Indonesia Comnts Plus (ICON+) Dalam Mewujudkan *Smart City*”. *Smart city* merupakan sebuah program yang trend dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam perkembangan Kota di suatu negara. Dengan mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota yang cerdas, merupakan keinginan besar masa depan Kota Palopo dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan sebuah system jaringan dan pelayanan

terhadap masyarakat Kota yang ditujukan untuk kesejahteraan serta kebaikan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan digital.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* antara PT Icons dengan pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan *smart city*. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. *Key informant* dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam terhadap 7 informan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* antara PT. Icons dengan pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan *smart city* terangkum dalam tiga variabel yaitu: (a) Berbagi Informasi, Pemerintah Kota Palopo dengan PT. Icon Plus saling berbagi informasi terkait dengan kebutuhan dalam melaksanakan kolaborasi. (b) Pembagian Akuntabilitas, pemerintah Kota Palopo dan PT-Icon Plus menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati. (c) Saling Percaya, pemerintah Kota Palopo memberikan kepercayaan seutuhnya kepada pihak PT. Icon Plus dalam menciptakan *provider* untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. faktor pendukung kolaborasi pemerintah Palopo dan PT. Icon Plus yaitu otoritas dan sumber daya. Dimana pada ketersediaan sumber daya memiliki modal dan SDM yang cukup mempuni. Pada faktor penghambat PT. Icon Plus dan pemerintah Kota Palopo dapat dilihat dari dua hal yaitu pengawasan dan sosialisasi. Pada faktor pengawasan institusi kurang melakukan pembaruan

terhadap informasi-informasi yang dimuat dalam *website* atau aplikasi yang digunakan dalam ruang lingkup pemerintahan. Pada sosialisasi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang membuat masyarakat masih merasa sangat kesulitan untuk memahami dan mempraktekkan terkait program-program dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran penerapan prinsip *collaborative governance* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dengan PT-Indonesai Comnts Plus (ICON+).

Penelitian kedua di tulis oleh M.Si, Annafik Khamamim, Dr. H. Muhammad Noor, Arief Rahman, dan Muhammad Arsyad pada tahun 2021 yang berjudul “Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pembangunan Daerah Berbasis *Smart City* Di Kota Balikpapan”. Kota Balikpapan, merupakan kota yang berada diperingkat kedua terbesar di Kalimantan Timur yang merupakan pusat perekonomian terbesar se-Kalimantan. Pada tahun 2019, Kota Balikpapan terpilih menjadi salah satu daerah yang menerapkan gerakan 100 *smart city*. *Smart city* ditawarkan sebagai sebuah pendekatan solutif untuk pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional serta mewujudkan tata kelola perkotaan kota Balikpapan yang berkelanjutan melalui kolaborasi ekosistem digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah kebijakan *smart city* Kota Balikpapan serta bagaimana tata kelola kolaboratif menuju visi Balikpapan kota yang nyaman dan layak huni. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara dengan berbagai informan yang memahami konteks penelitian tersebut serta studi dokumentasi melalui telusuran berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang dilakukan melalui akselerasi dan sinergi pembangunan daerah dan sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2016- 2021. Fokus pengembangan *smart city* Kota Balikpapan diarahkan pada pilar smart environment dimana sesuai dengan visi *smart city* yang diusung, yaitu Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan layak huni serta berbasis lingkungan berkelanjutan. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, korporasi, dunia usaha, media serta adanya interdependensi antar aktor kolaborasi merupakan bagian dari prasyarat bagi keberhasilan *smart city* Kota Balikpapan. Adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari berbagai *stakeholders* merupakan keuntungan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya percepatan pengembangan *smart city* di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah memainkan peran sebagai aktor penggerak program *smart city* yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti dewan pakar dan praktisi serta pihak swasta untuk mengimplementasikan kebijakan *smart city* yang telah dirancang.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang di teliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui gambaran mengenai tata kelola kolaboratif berbasis *smart city* pada pemerintahan kota. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui Peluang dan tantangan dalam arah kebijakan *smart city* pada sebuah kota.

Penelitian ketiga ditulis oleh Arwanto Ginting dan Adi Suhendra pada tahun 2018 dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri yang berjudul “Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Membangun *Smart City* Di Kota Medan”. Penelitian ini membahas terkait pembentukan lembaga pembina tim *smart city* di Kota Medan. Salah satu bentuk pembinaan pemerintah daerah dalam program *smart city* yaitu pemerintah daerah mengkoordinasi pemanfaatan TIK secara menyeluruh, serta memberikan informasi terpercaya kepada publik dalam mewujudkan daya saing daerah. Dalam lingkup kajian ini adanya urgensi lembaga yang membina program *smart city* yaitu menekankan pada aspek hukum dan formal dalam pelayanan publik dan menata tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini membahas terkait pembentukan lembaga pembina *smart city* di Kota Medan. Pengertian pembina *smart city* dalam penelitian ini ialah bagaimana OPD dalam mengkoordinasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan, serta membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam mewujudkan daya saing daerah. Adanya lembaga yang membina *smart city* di sebuah kota dalam kajian ini ialah untuk menekankan pada aspek hukum dan formal dalam mengatur inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjabarkan bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didalam mengkoordinasikan program *smart city* pada tingkat kota dan kendala apa saja yang dihadapi beserta dengan solusinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan cara observasi, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, serta tulisan maupun gambar guna menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan dalam pengolahan data dengan melakukan reduksi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan *smart city* di kota Medan, pemerintah Kota Medan memanfaatkan sarana dan prasarana multimedia dalam proses tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih handal, interaktif dan menarik minat masyarakat. Sebagai keterpaduan antar Organisasi Antar daerah (OPD) pemerintah Kota Medan merumuskan master plan pada pembangunan *smart city*. Dalam mewujudkan kota Medan sebagai kota cerdas, pemerintah Kota Medan dihadapkan dengan berbagai kendala seperti ketidaksiapan SDM dalam memanfaatkan TIK dalam proses pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan serta belum meratanya infrastruktur yang mendukung terhadap penerapan TIK. Namun berbagai upaya telah dipersiapkan dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan memperhatikan pada infrastruktur jaringan, integrasi jaringan, sumber daya manusia, infrastruktur aplikasi, infrastruktur informasi, pendanaan, sistem manajemen dan proses kerja untuk tata kelola yang lebih baik. Dalam rencana strategis ini, pelayanan

publik berkaitan erat dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Sehingga pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran kebijakan organisasi pemerintahan daerah (OPD) di kota Medan dalam mengkoordinasikan program *smart city*. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dan upaya yang telah dipersiapkan dalam membangun *smart city* di Kota Medan.

Penelitian keempat ditulis oleh Hilmy Yahya dan Sudarmo pada tahun 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan *Smart City* di Kota Surakarta”. Saat ini era yang sudah serba digital mampu mendobrak negara untuk melakukan perubahan kearah digitalisasi, termasuk pada negara Indonesia. Program “100 *smart cities*” telah dirancang pemerintah Indonesia, dimana salah satu kota tersebut adalah Kota Surakarta. Program EPPSON merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Surakarta, dimana dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta melakukan kolaboratif dengan berbagai pihak *stakeholder* atau yang disebut dengan *collaborative governance* guna mewujudkan program EPPSON.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses kolaboratif yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam program EPPSON sebagai bentuk program andalan

terwujudnya *smart city* di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti menggunakan data primer berupa wawancara dengan aktor yang terlibat, dan data sekunder diambil dari perjanjian kesepakatan kerjasama/MoU, jurnal, *website* resmi instansi, serta buku riset penelitian milik para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota surakarta khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan menjalankan program EPPSON, dengan tujuan menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak, baik pajak daerah maupun PBB. Model *collaborative* yang digunakan yaitu milik teori Ansell dan Gash (2008) yang terbagi kedalam 4 proses yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, serta proses kolaboratif. Dalam aspek kondisi awal, dilakukannya kolaborasi memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memberikan akses kemudahan bagi masyarakat. Aspek kepemimpinan fasilitatif, dimana dari aktor utama yaitu direktur BPPKAD memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sehingga mampu mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dan dari aktor-aktor yang lain bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan arus pajak yang dibayarkan oleh masyarakat hingga sampai ke RKUD. Desain kelembagaan, dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem secara *online* serta PERDA no 11 Tahun 2018 mengenai pajak daerah, serta melakukan MoU untuk dasar dari

perjanjian kerja sama antara aktor utama dengan para *stakeholder*. Pada proses kolaborasi, terdapat 5 tahap yakni proses tatap muka, membangun kepercayaan penuh, komitmen terhadap proses dan saling memahami. Pada hasil kolaboratif menunjukkan bahwa BPPKAD mendapatkan hasil PAD yang meningkat, serta bank mendapatkan hasil kepuasan nasabah yang tinggi atas kemudahan pelayanan yang diberikan serta terkait dana endapan pada RKUD.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam suatu program mewujudkan *smart city* dengan menggunakan model teori Ansell dan Gash (2008). Dengan adanya rujukan ini peneliti menggunakan hasil penelitiannya sebagai acuan pada kajian teori.

Penelitian kelima di tulis oleh Yunita Fitri pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan PT Telkom Dalam Membangun Semarang *Smart City*”. Penerapan konsep *smart city* dalam mewujudkan kota cerdas di kota Semarang berfokus pada pelayanan, salah satunya adalah melakukan penerapan strategi *public private partnership* guna menyediakan berbagai macam layanan publik di Kota Semarang. Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang berkolaboratif dengan PT. Telkom melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan program *Digital Government Services* melalui Semarang *Smart City*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan proses implementasi kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Telkom, serta mengkaji realisasi dari implementasi kerja sama tersebut dalam menghasilkan program-program yang terkait dalam pembangunan Semarang *Smart City*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan terhadap *key informant* atau *key person*, sedangkan pada pengumpulan data sekunder dilakukan melalui arsip, studi dokumen, dan sumber lain yang memiliki hubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kerjasama Pemkot Kota Semarang dan PT. Telkom dalam membangun Semarang *Smart City*, telah berjalan dengan baik dan mampu menciptakan program-program yang inovatif dan berdayaguna dalam pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti meliputi pengadaan sarana *wifi* gratis di area-area publik, membangun fasilitas pelayanan terpadu, membangun fasilitas SDK (Semarang Digital Kreatif), menciptakan alat transmisi data pada jaringan computer (*fiber optic*), dan mewujudkan fasilitas *E-Commerce* untuk para UKM di Kota Semarang. Keterlibatan birokrat tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan program-program tersebut, namun belum seluruh birokrat pemerintah Kota Semarang bisa mengoperasikan teknologi dengan baik, dengan begitu pemerintah supaya dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembekalan untuk para birokrat sehingga dalam pelaksanaan program yang telah dibangun dapat menunjang keefektifitasannya.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui pelaksanaan implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah kota dengan perusahaan swasta. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana realisasi dari kerja sama yang dilakukan dalam mewujudkan Semarang *Smart City*.

Penelitian keenam ditulis oleh Eko Priyo, Lubna Salsabila dan Lenny Kurniasari pada tahun 2019 dengan judul “Kolaborasi Antara PT Gas Negara Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan *Smart City*”. Dalam menyambut kehadiran program *smart city*, Kota Yogyakarta mengimplementasikan *e-government* dalam tata ruang kelola pemerintahannya. Pemerintah Yogyakarta dalam menunjang pelaksanaan *smart city* tidak bisa bekerja sendiri, melainkan melakukan *collaborative governance* dengan melibatkan berbagai *stakeholder* untuk menjalankan suatu program. Melalui pembuatan kebijakan, pengumpulan data, serta pelaksanaan yang melibatkan semua pihak dalam kerjasama (Morales & Meek, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan proses *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sektor usaha, yaitu PT Gas Negara dalam mewujudkan konsep kota cerdas. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Teknik perolehan data dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan *key informant*, analisis dokumen, media cetak dan elektronik, serta studi pustaka terkait lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan, pemerintah Kota Jogja menjalin kesepakatan kerjasama dengan badan usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Gas Negara dalam upaya membangun kota cerdas. Ditemukan bahwa proses kolaboratif antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak sector usaha dan juga masyarakat, yaitu berkolaborasi dengan Kepolisian, Rumah sakit, Baznas,dll untuk menunjang penggunaan aplikasi Jogja *Smart Service* (JSS). Proses kolaboratif dilakukan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Yogyakarta dengan Direktur Utama PT PGN. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan, merupakan strategi jangka panjang PT Gas Negara dalam pengoptimalan penggunaan gas bumi. Dalam mengembangkan pemanfaatan tersebut, direncanakan akan membangun jaringan distribusi pipa sepanjang 500 km, untuk menyerukan gas bumi sebagai energi alternatif. Serta membangun pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses kerja *collaborative governance* yang telah dilakukan antara pemkot Yogyakarta dengan PT Gas Negara. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam mewujudkan indikator *smart city* yaitu melalui *smart environment, smart economy, dan smart torism*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Siti Widharetno pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Bandung”. Implementasi konsep *smart city* merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja dari

penyelenggaraan pemerintah daerah. *Smart city* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung, hadir sebagai pemenuhan dari tuntutan zaman yang kian berkembang dalam bidang media dan teknologinya. Untuk itu perlu meng-*upgrade* kemampuan pengawasan dari pemerintah kota melalui penerapan konsep *smart city*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *smart city* di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan *survey*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Hoberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan mengembangkan teknik triangulasi data untuk validasi data

Hasil penelitian terlihat bahwa sosialisasi tentang *smart city* masih belum merata menyeluruh, infrastruktur yang kurang memadai, pemahaman fasilitas yang kurang untuk *smart city*, dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Walikota Bandung. Dengan begitu saran dari penelitian ini adalah agar Kota Bandung dapat menciptakan *branding* Bandung sebagai *smart city*, melalui media promosi agar lebih dikenal oleh publik. Serta penyelenggaraan *smart city* agar terintegrasi dengan RPJMD Kota, sehingga program yang akan dijalankan dapat menempatkan tempat penyusunan RKPD Kota Bandung dan renstra SKPD terkait. Dan usulan terbaru berkaitan dengan regulasi elemen Bandung sebagai kota pintar, yang meliputi kelembagaan yang organisasi, regulasi seperti aturan/etika/budaya, harus diperhatikan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti pada bagian implementasi konsep *smart city* di sebuah kota sebagai solusi dari penyelesaian masalah kota. Serta kesamaan lainnya adalah pada bagian metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik analisis model Miles dan Huberman.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ahmad Harakan dan Ferawaty pada tahun 2020, yang berjudul “*Collaborative governance* dalam menjalankan sistem keamanan berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kota Makassar”. Semakin majunya teknologi pada saat ini merupakan salah satu peluang bagi badan swasta atau *Non Government Organization* (NGO) serta publik untuk membangun daerahnya semakin maju, melalui penyelenggaraan *collaborative governance*. Hal tersebut juga sebagai solusi dari permasalahan yang ada di Kota Makassar, salah satunya terkait dengan masalah keamanan. Terutama pada Kecamatan Panakkukang, untuk itu Pemkot Makassar menjalankan *collaborative governance* antara Pemerintahan, Kepolisian, Diskominfo, pihak swasta, serta masyarakat untuk mengaplikasikan sistem keamanan berbasis CCTV.

Kajian ini akan mengeksplorasi bentuk *collaborative governance* antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem keamanan di Kabupaten Panakkukang melalui pemantauan CCTV dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pengelolaan Sistem Keamanan di Kabupaten Panakkukang dengan CCTV. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil studi menunjukkan bentuk dari *collaborative governance* yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Panakkukang bersama dengan Dinas Kominfo Kota Makassar, Polrestabes Makassar, swasta, dan publik dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV adalah pertama, melalui dialog tatap muka dalam menjalin komunikasi multiarah agar terciptanya umpan balik (*feedback*) dalam menjelankan sebuah program. Kedua, membangun kepercayaan melalui keterbukaan (transparansi) antar *stakeholder* dalam proses mencapai sebuah tujuan yaitu keamanan di Kecamatan Panakkukang. Ketiga, adanya komitmen dalam menjalankan suatu proses, melalui adanya konsistensi dan komitmen oleh setiap pemangku kepentingan Dan yang terakhir yaitu berbagi pemahaman, antar *stakeholder* penting untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang nantinya akan mempermudah dalam pemecahan suatu masalah. Selain itu proses *collaborative governance* yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Panakkukang memiliki faktor pendukung melalui adanya Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Dan Gedung Sedangkan faktor yang menghambat ialah sumber daya manusia, pendanaan yang terbatas, dan partisipasi pihak ketiga yang tidak mencukupi.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti terkait membangun *collaborative governance* sebagai solusi dari permasalahan sebuah kota. Dan peneliti menggunakan teori yang disajikan sebagai bagian dari kajian teori tentang *collaborative governance*.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Cika Fauziah, Tri Kuntoro, dan Sri Rum Giyarsih pada tahun 2020 dengan judul “Kontribusi PT. Telkom Dalam Pengembangan UMKM Perkotaan di Yogyakarta”. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peran strategis di dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi global yang imbasnya masih berlangsung hingga sekarang. Namun demikian, masih banyak terdapat UMKM di Indonesia yang belum memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) secara optimal dan maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi PT. Telkom dalam pengembangan UMKM di perkotaan serta bagaimana pengaruh terhadap ketahanan wirausaha ekonomi para pemuda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perolehan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengolahan serta analisis data dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perusahaan PT. Telkom telah berkontribusi baik terhadap pengembangan UMKM di perkotaan yaitu memberikan

sosialisasi mengenai akses pasar melalui pameran/promosi, memberikan akses untuk peluang bisnis, dan memberikan jangkauan pelayanan yang luas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMKM perkotaan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan wirausaha ekonomi pemuda dalam hal: memiliki daya saing yang tinggi, meningkatnya kemandirian ekonomi pemuda, bertambah majunya usaha yang ditekuni pelaku UMKM perkotaan, memiliki jiwa kreatif dan pantang menyerah, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya keterampilan terkait pemasaran *online* para pelaku UMKM di perkotaan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana PT Telkom dalam berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di perkotaan. Melalui rujukan ini juga menjadi acuan bahwa pengembangan UMKM termasuk salah satu bentuk program PT Telkom dalam mewujudkan *smart city*.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Aan Widodo dan Diah Ayu Permatasari pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi *Smart City*”. Walikota Bekasi menginisiasi *smart city* sebagai konsep kota pintar yang dapat membantu publik dalam mengelola sumber daya manusia yang secara efisien dan efektif dalam meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Wilayah Bekasi. *Smart city* hadir sebagai program yang mendukung visi yang telah ditetapkan, yaitu menjadi kota beradab, teratur, maju serta berwawasan lingkungan.

Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana bentuk strategi komunikasi pemerintah kota Bekasi dalam mewujudkan keberhasilan Program Bekasi *Smart City*. Konsep yang digunakan adalah program komunikasi dan strategi komunikasi. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian didapatkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap *key informant*, serta studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyukseskan program Bekasi *smart city* pemerintah Kota Bekasi melakukan sosialisasi dengan strategi komunikasi. Proses sosialisasi dilakukan yaitu di mulai dari aparaturnya pemerintah kepada tim pelaksana, tim pelaksana kepada dinas terkait, dinas terkait kepada masyarakat. Strategi komunikasi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan maupun *event* dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat dan stakeholder supaya dapat memahami dan menjalankan program. Taklepas berbagai hambatan muncul dalam penyelenggaraan program diantaranya masih minimnya pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang konsep *smart city*. Penelitian ini bersifat umum dan masih pada tahap memetakan strategi komunikasi pemerintah kota dalam sebuah pencapaian program, dengan harapan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih spesifik dari berbagai jenis sistem aplikasi pendukung *smart city* di Kota Bekasi, serta dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan penggunaan aplikasi tersebut di masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui strategi awal pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan

program Bekasi *Smart City*. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui hambatan apa saja yang telah dirasakan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan program Bekasi *Smart City*.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas implementasi penerapan *smart city* pada kota-kota besar. Pada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji terkait *collaborative governance* dengan pihak swasta maupun lembaga lainnya yaitu seperti, PT-Indonesia Comnts Plus (ICON+) (Jalil, 2020), dan PT Gas Negara (PGN) (Kurniasari dkk., 2020) . Namun ditemukan satu penelitian yang sama terkait membahas *collaborative governace* dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam mewujudkan *smart city* yaitu pada Kota Semarang (Fitri, 2017). Dalam penelitian ini berfokus pada fenomena *collaborative governance* antara pemerintah Kota Bekasi dan PT. Telkom dalam mewujudkan Bekasi *Smart City*. Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, kajian sebelumnya lebih banyak memaparkan pada implementasinya saja, ataupun pada penarapan *smart city* melalui gambaran secara keseluruhan.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan melalui analisis *collaborative governance* dalam implementasi *smart city* di Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan penerapan Kolaboratif Pemerintah Kota Bekasi dan PT Telkom dalam mewujudkan Bekasi *Smart City* serta keterlibatan publik dalam program *smart city* yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bekasi.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam pengimplementasian kolaborasi program *smart city* antara pemkot Bekasi dengan PT Telkom, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam implementasi konsep *smart city* di harapkan program yang dijalankan sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Dengan kajian ini pula dapat memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan Bekasi *Smart City*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan penulis, agar di peroleh pembahasan yang memberikan penjelasan secara keseluruhan, untuk itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan deskripsi umum mengenai dasar kajian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjabarkan berbagai teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Kolaboratif Pemerintah Kota Bekasi dan PT Telkom Dalam Mewujudkan Bekasi *Smart City*. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance*, teori *smart city* serta teori persepsi. Dan pada bab ini pula terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, Goodness dan Quality *Criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, yang berisi gambaran umum dari objek penelitian, pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti berdasarkan rujukan teori dan temuan yang ada di lapangan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari semua hasil kajian yang telah dilakukan, dan juga terdapat rekomendasi penelitian yang didalamnya terdapat saran (rekomendasi) baik untuk objek penelitian maupun untuk kajian lanjutan yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang buku, jurnal, produk hukum, serta *website* yang dijadikan sebagai acuan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

LAMPIRAN